



RENCANA KERJA INSPEKTORAT

(RENJA)

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai



20
26

inspektoratmtw@gmail.com
www.inspektorat.mentawaikab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	49
3.3 Program dan Kegiatan.....	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
BAB V PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian IKU Inspektorat Daerah Mentawai tahun 2024	8
Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024...	10
Tabel 2. 3 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024	14
Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024, 2025	23
Tabel 2. 6 Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2026-2029.....	27
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Inspektorat Daerah.....	50
Tabel 3. 2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran.....	52
Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.....	56
Tabel 4. 1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final.....	70

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, pembinaan, serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, serta kebutuhan pengawasan yang berbasis risiko. Dengan demikian, diharapkan kinerja pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.


Kami menyadari bahwa Renja ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan, kerja sama, dan sinergi dari seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan

memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, 22 Desember 2025

Inspektur



Serieli Bawamenewi, SH, CGCA

NIP.19830905 200802 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, serta sub-kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat serta bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Salah satu tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026 yaitu Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia. Sasaran dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kualitas tata Kelola

pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel, Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima adaptif, inovatif dan melayani.

Dalam rangka memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan secara optimal dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, maka Renja Inspektorat ini disusun secara sistematis dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang andal dalam menjaga integritas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat daerah, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 serta menjadi dasar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 mempedomani peraturan – peraturan yaitu:

1. undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instransi pemerintah daerah;
6. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian internal;
7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan acuan dalam penentuan program kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten kepulauan Mentawai secara berkesinambungan.

Rencana Kerja ini didasarkan pada Rencana RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah untuk:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan serta sub-kegiatan pengawasan Inspektorat yang mengarah pada pencapaian tujuan Pembangunan baik ditingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*strakeholder*) Inspektorat Daerah dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan (PKPT) Berbasis Risiko dengan menetapkan focus atau sasaran prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja dengan detail agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses penyusunan Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menggambarkan kajian/ reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan Perkiraan capaian berjalan (n-1)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas Pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan penjabaran rencana kerja tahunan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Pada Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang sedang berjalan, serta pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026. Adapun Inspektorat memiliki tujuan dan sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Tujuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah
 - a. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan manajemen risiko perangkat daerah.
 - b. Mewujudkan peran APIP yang profesional dan berintegritas.
2. Sasaran Strategis
 - a. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Meningkatnya tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan aparat pengawasan eksternal;
 - d. Meningkatnya maturitas SPIP dan penerapan manajemen risiko di perangkat daerah;
 - e. Meningkatnya kapabilitas dan profesionalisme APIP;
 - f. Meningkatnya budaya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama tertuang pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level	3	3	Tercapai
		Persentase Tindak lanjut temuan	Persentase	85	71,63	Belum Tercapai
		Kapabilitas APIP	Level	3	3	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	Tercapai
		WBK/ WBBM	OPD	3	0	Belum Tercapai
		Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	Tercapai
		Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	Persentase	86	100	Tercapai

Dari tabel diatas disampaikan bahwa 2 sasaran strategis Inspektorat tersebut didukung oleh 3 (tiga) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan, dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp9.899.660.137 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) Dalam Pelaksanaanya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebesar dengan realisasi anggaran Rp9.488.948.747 (Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Puluh

Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 95,85%.

Pelaksanaan program-program Inspektorat Daerah Tahun 2024 seperti yang tertuang pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi	%
	Anggaran Inspektorat Daerah	Rp9.899.660.137,-	Rp9.488.948.747,-	95.85
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp7.351.383.437,-	Rp7.007.261.547,-	95.32
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.555.447.937,-	Rp4.324.755.161,-	94.94
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.430.947.937,-	Rp4.215.978.161,-	95.15
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp124.500.000,-	Rp108.777.000,-	87.37
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp411.205.600,-	Rp405.380.654,-	98.58
2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp411.205.600,-	Rp405.380.654,-	98.58
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.086.727.500,-	Rp1.082.593.404,-	99.62
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp13.000.500,-	Rp12.995.620,-	99.96
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp8.641.000,-	Rp8.100.657,-	93.75
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp122.455.000,-	Rp120.058.000,-	98.04
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp13.500.000,-	Rp13.417.220,-	99.39
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Rp28.475.000,-	Rp28.475.000,-	100.00
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp900.655.400,-	Rp899.546.907,-	99.88
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp174.400.000,-	Rp124.880.000,-	71.61
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp174.400.000,-	Rp124.880.000,-	71.61

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi	%
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp795.973.000,-	Rp754.994.691,-	94.85
5.1	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp85.130.000,-	Rp80.508.571,-	94.57
5.2	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Umum Kantor	Rp710.843.000,-	Rp674.486.120,-	94.89
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp327.629.400,-	Rp314.657.637,-	96.04
6.1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp17.020.000,-	Rp16.982.340,-	99.78
6.2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp34.168.400,-	Rp26.699.650,-	78.14
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp27.270.000,-	Rp22.240.000,-	81.55
6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp249.173.000,-	Rp248.735.647,-	99.82
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp2.211.660.000,-	Rp2.171.939.528,-	98.20
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp1.914.707.800,-	Rp1.886.338.678,-	98.52
1.1	Pegawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp231.572.000,-	Rp230.913.000,-	99.72
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp92.216.400,-	Rp92.058.200,-	99.83
1.3	Reviu Laporan Kinerja	Rp432.867.000,-	Rp426.836.899,-	98.61
1.4	Reviu Laporan Keuangan	Rp30.735.800,-	Rp29.430.800,-	95.75
1.5	Pengawasan Desa	Rp589.055.400,-	Rp589.055.400,-	100.00
1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp334.932.600,-	Rp318.656.679,-	95.14

No.	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi	%
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp203.328.600,-	Rp199.387.700,-	9.06
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp296.952.200,-	Rp285.600.850,-	96.18
2.1	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp296.952.200,-	Rp285.600.850,-	96.18
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp336.616.700,-	Rp309.747.672,-	92.02
1	Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp93.813.000,-	Rp91.525.000,-	97.56
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp93.813.000,-	Rp91.525.000,-	97.56
2	Pendampingan dan Asistensi	Rp242.803.700,-	Rp218.222.672,-	89.88
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp20.123.000,-	Rp15.177.000,-	75.42
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp57.035.000,-	Rp52.090.000,-	91.33
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Rp72.551.200,-	Rp65.714.400,-	90.58
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp93.094.500,-	Rp85.214.272,-	91.54

Penjelasannya Total Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp9.899.660.137 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.7.351.383.437,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.7.007.261.547,- (Tujuh Miliar Tujuh Juta Dua ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp.2.211.660.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Sebelah Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.2.171.939.528,- (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp.336.616.700,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp309.747.672,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Reviu Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.3 berikut :

No	Sumber OPD	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (komponen) Kegiatan (output)	Target Utama OPD Kabupaten pada Tahun 2023 dan 2024	Realisasi Capaian Kinerja Utama OPD Kabupaten sampai dengan Bujur OPD Tahun 2023		Target Kinerja OPD Kabupaten Tahun 2023		Target Kinerja OPD Kabupaten Tahun 2024		Target Kinerja OPD Kabupaten Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
6.01.02.121.0001	6.01.02.121.0001	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN		4.750.000,00	2.584.873,127	2.211.664,000	167.268,407	259.171,600	385.502,899	1.386.996,629	2.174.939,528	14.441.12	14.441.12	13.127.710,00%	13.127.710,00%	13.127.710,00%				
6.01.02.121.0002	6.01.02.121.0002	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL		3.500.000,00	2.100.000,00	1.914.000,00	119.500,00	181.350,00	300.200,00	1.250.750,00	1.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%				
6.01.02.121.0003	6.01.02.121.0003	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	850.000,00	308.251,600	251.572,000	16.425,000	36.796,200	71.411,500	104.300,300	280.000,000	100,00	99,73	100,00	99,73	42	330.164,900	175,00	68,00	berprestasi
6.01.02.121.0004	6.01.02.121.0004	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	850.000,00	172.258,800	92.214,400	-	1.790,000	1.300,000	68.782,200	92.000,000	100,00	99,83	100,00	99,83	16	264.314,000	66,67	48,00	berprestasi
6.01.02.121.0005	6.01.02.121.0005	Rencana Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Berita Acara	850.000,00	334.079,600	452.802,200	76.795,000	89.002,000	103.960,999	137.033,000	430.806,999	100,00	96,64	100,00	96,64	218	791.766,699	260,00	138,00	berprestasi
6.01.02.121.0006	6.01.02.121.0006	Rencana Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Berita Acara	200.000,00	27.693,800	30.703,800	14.523,000	10.437,600	1.200,000	3.460,800	29.630,800	100,00	93,75	100,00	93,75	74	67.126,600	200,00	33,56	berprestasi
6.01.02.121.0007	6.01.02.121.0007	Pengawasan Dana	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Dana	1.000.000,00	610.976,000	599.026,000	3.000,000	-	6	49.280,000	599.026,000	100,00	100,00	100,00	28	1.199.027,300	160,00	115,96	berprestasi	
6.01.02.121.0008	6.01.02.121.0008	Kepatuhan Pengawasan Internal	Jumlah Sempadan Pengawasan Internal yang diadukan	600.000,00	514.488,207	534.902,000	-	11.300,000	54.077,600	247.100,000	318.686,979	100,00	93,14	4	833.155,206	200,00	138,86	berprestasi		
6.01.02.121.0009	6.01.02.121.0009	Monitoring dan evaluasi Think Tangkai (KORPRI dan Tindak Lanjut Pengawasan) APSP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Think Tangkai Hasil Pengawasan KORPRI dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APSP	400.000,00	156.479,000	200.326,000	9.313,800	24.790,200	46.693,800	118.268,800	199.397,700	100,00	98,06	4	334.866,700	200,00	78,86	berprestasi		
6.01.02.121.0010	6.01.02.121.0010	PENYELANGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		800.000,00	200.887,600	296.002,200	47.807,600	57.837,400	51.107,000	170.244,600	285.699,000						484.684,000			
6.01.02.121.0011	6.01.02.121.0011	Pemantauan Penyelidikan Keagamaan Negeri / Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Keagamaan Negeri / Daerah yang diteliti	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0									
6.01.02.121.0012	6.01.02.121.0012	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	500.000,00	200.887,600	296.002,200	47.807,600	57.837,400	51.107,000	170.244,600	285.699,000									
6.01.02.121.0013	6.01.02.121.0013	MONITORING DAN EVALUASI TINGKAT KEBERHASILAN, PENCAPAIAN, DAN AKSESIBILITAS		1.900.000,00	940.000,250	336.167,700		74.730,900	55.360,000	184.448,172	509.747,972									
6.01.02.121.0014	6.01.02.121.0014	PERHIMPATAN KEBERHASILAN, PENCAPAIAN, DAN AKSESIBILITAS		300.000,00	113.502,600	99.831,000		25.105,000	16.890,000	43.520,000	91.520,000									
6.01.02.121.0015	6.01.02.121.0015	Pemantauan Kelembagaan, Tindakan di Bidang Penyelidikan Keagamaan	Jumlah Kelembagaan Kelembagaan Tindakan di Bidang Penyelidikan Keagamaan yang diteliti	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-									
6.01.02.121.0016	6.01.02.121.0016	Pemantauan Kelembagaan, Tindakan di Bidang Penyelidikan Keagamaan	Jumlah Kelembagaan Kelembagaan Tindakan di Bidang Penyelidikan Keagamaan yang diteliti	300.000,00	113.502,600	99.831,000	-	25.105,000	16.890,000	43.520,000	91.520,000									
6.01.02.121.0017	6.01.02.121.0017	Pemantauan Kelembagaan, Tindakan di Bidang Penyelidikan Keagamaan	Jumlah Kelembagaan Kelembagaan Tindakan di Bidang Penyelidikan Keagamaan yang diteliti	300.000,00	113.502,600	99.831,000	-	25.105,000	16.890,000	43.520,000	91.520,000									

Dari data sebagaimana tabel 2.3 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Inspektorat Daerah
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 3 program, 10 kegiatan, 29 sub kegiatan dengan 29 indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 29 Sub Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Sub Kegiatan semuanya telah mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level	3	3	Tercapai
		Persentase Tindak lanjut temuan	Persentase	85	71,63	Belum Tercapai
		Kapabilitas APIP	Level	3	3	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	Tercapai
		WBK/ WBBM	OPD	3	0	Belum Tercapai
		Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	Tercapai
		Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	Persentase	86	100	Tercapai

Sumber: Lakip Inspektorat Tahun 2024

- c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024, diketahui bahwa beberapa indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor strategis maupun teknis sebagai berikut:

Faktor Strategis

- a) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi jumlah maupun kompetensi auditor dan pengawas, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pengawasan secara optimal;
- b) Tingginya kompleksitas dan cakupan wilayah pengawasan, khususnya kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang terdiri dari pulau-pulau, berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c) Belum optimalnya komitmen dan sinergi lintas perangkat daerah, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu;
- d) Keterbatasan dukungan anggaran, yang mempengaruhi intensitas pelaksanaan pengawasan dan pengembangan kapasitas SDM.

2. Faktor Teknis

- a) Perencanaan kegiatan yang belum sepenuhnya berbasis risiko (risk based), sehingga prioritas pengawasan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan strategis organisasi;

- b) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaporan kinerja;
- c) Kendala administratif dan teknis operasional, seperti keterlambatan pengumpulan data dukung dan penyampaian laporan dari perangkat daerah yang diawasi;
- d) Perubahan kebijakan dan regulasi, yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja.

d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam hal ini telah melakukan:

1. Meningkatkan pengembangan kompetensi APIP melalui bimtek/ pelatihan/ kediklatan/ workshop/ sosialisasi;
2. Menempatkan diri sebagai partner strategis OPD dalam rangka memaksimalkan fungsi consulting yang mengawal ketercapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur baik auditor dan PPUPD maupun pihak manajemen dan pengupayaan rapat koordinasi disela-sela kesibukan;
4. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahuna Berbasis Resiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko;
5. Peningkatan kualitas audit kinerja sehingga dapat menilai aspek ekonois, efisien dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis dengan mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada instansi yang menjadi obrik pemeriksaan;

6. Berkoordinasi secara intens dengan Instansi Pembina dalam rangka pencapaian kapabilitas APIP dan kinerja Inspektorat Daerah;
 7. Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
- e. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tindak lanjut meningkatkan kinerja adalah:
1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang ketercapaian kapabilitas APIP secara berkala;
 2. Melakukan Koordinasi yang lebih intens dan berkala dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat selaku Instansi Pembina Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 3. Memberikan pembinaan dan penegasan secara terus menerus kepada obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti hasil temuan pengawasan baik ekstern maupun intern;
 4. Terus melakukan peningkatan pada kompetensi APIP melalui diklat/ bimtek/ pelatihan/ workshop/ sosialisasi yang semakin intens;
 5. Melakukan penilaian risiko strategis OPD dan mengawal OPD dalam rangka meminimalisir risiko;
 6. Menyusun rencana kerja reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai;
 7. Melaksanakan rencana aksi dengan didasari komitmen bersama oleh seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pada dasarnya Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dengan menjalankan fungsi penjaminan mutu (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*), sehingga secara tugas pokok dan fungsi tidak melaksanakan fungsi pelayanan kepada Masyarakat. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan pelayanan yang bersifat konsultatif/ consulting kepada Perangkat Daerah Lain.

Berdasarkan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, Inspektorat Daerah melaksanakan Urusan Pengawasan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolak ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Pada Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah menggunakan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah terdapat dalam tabel 2.7 dan untuk target kinerja Inspektorat Daerah tahun 2025-2029 terdapat dalam tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024, 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	2
		Persentase Tindak lanjut temuan	Persentase	85	71.63	88	71.72
		Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP
		WBK/ WBBM	OPD	3	0	4	
		Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	B	
		Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	Persentase	3	3	3	2

Sumber: Lakip Inspektorat Tahun 2024, 2025

Evaluasi Capaian Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

EVALUASI RENCANA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN BENTAYU TAHUN 2025

No	Sesuai OTD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (mencakup Kegiatan/ output)	Target Rencana OTD Subsektor pada Tahun 2025 dan 2026	Realisasi Kinerja pada Triwulan						Target Capaian Kinerja Disagregasi dengan Rencana OTD (Kategori Tahun Berjalan yang diarahkan) 2025	Target Capaian Kinerja Disagregasi dengan Rencana OTD (Kategori Tahun Berjalan yang diarahkan) 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah (Kategori PD Tahun 2025)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah (Kategori PD Tahun 2025)	Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab			
					I	II	III	IV	K	Rp						K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
6.01.01.01.01.01	Meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENGUANGAN URSUAN PERBENTARAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.326.921.000	12.897.734.141	7.144.594.778	1.317.611.228	1.960.220.385	1.417.694.577	2.813.295.997	4.828.164.137	13.426.021.309						
6.01.01.01.01.02		PERANGKATAN, PENGANGKARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.01.01.01.01.03		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Orang yang menerima uji dan instruksi ASN	5.500.000.000	7.798.776.821	4.707.933.986	1.127.925.290	1.206.095.014	979.520.425	1.013.888.610	4.410.440.999	11.194.163.209						
6.01.01.02.01.01		Penyediaan City dan Transportasi ASN	Jumlah Orang yang menerima uji dan instruksi ASN	5.000.000.000	7.640.175.821	4.612.250.086	1.118.690.280	1.268.698.014	969.220.025	963.138.610	4.313.696.996	11.564.273.620	299.29	299.29	Inspektariat			
6.01.01.02.02.01		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengetahuan dan Instruksi ASN	500.000.000	139.877.000	91.340.000	8.990.000	22.290.000	15.500.000	50.790.000	95.340.000	100.000	48	254.917.000	192.00	64,98	Inspektariat	
6.01.01.03.01		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.01.01.03.02		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Target Penilaian dan Pelatikan Pegawai Berdasarkan Target dan Pungli	400.000.000	726.619.742	311.160.000	14.270.100	14.710.100	63.514.514	220.790.252	309.014.256	1.028.024.448						
6.01.01.03.03.01		Penyediaan dan Pelatikan Pegawai Berdasarkan Target dan Pungli	Jumlah Pegawai Berdasarkan Target Penilaian dan Pelatikan Pegawai Berdasarkan Target dan Pungli	400.000.000	726.619.742	311.160.000	14.270.100	14.710.100	63.514.514	220.790.252	309.014.256	1.028.024.448						
6.01.01.03.03.02		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Pelat Berasak dan Pelat Berasak	1.300.000.000	2.261.380.389	1.187.595.669	104.867.900	339.813.957	371.094.148	384.032.092	1.170.936.097	3.412.893.166						
6.01.01.03.03.03		Penyediaan Komposisi Instansi Jarak/ Penempatan Berencana Kantor	Jumlah Pelat Empangan Instansi Jarak/ Penempatan Berencana Kantor yang diarahkan	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.01.01.03.03.04		Penyediaan Pelat dan Pelat Berasak Kantor	Jumlah Pelat Perantara dan Pelat Berasak Kantor yang diarahkan	400.000.000	17.942.007	3.545.000	0	0	0	0	0	0						
6.01.01.03.03.05		Penyediaan Pelat dan Pelat Berasak Kantor	Jumlah Pelat Berasak Kantor yang diarahkan	150.000.000	17.942.007	3.545.000	0	0	0	0	0	0						
6.01.01.03.03.06		Penyediaan Pelat dan Pelat Berasak Kantor	Jumlah Pelat Berasak Kantor yang diarahkan	200.000.000	290.921.000	142.166.600	13.886.200	34.460.745	21.485.028	64.297.800	134.611.065	428.552.000	171,42	171,42	Inspektariat			
6.01.01.03.03.07		Penyediaan Pelat dan Pelat Berasak Kantor	Jumlah Pelat Berasak Kantor dan Pelat Berasak Kantor yang diarahkan	70.000.000	36.506.200	15.000.000	1.224.500	5.682.200	3.600.000	4.880.000	14.980.700	100.000	99,91	4	51.290.020	133,33	73,28	Inspektariat
6.01.01.03.03.08		Penyediaan Pelat dan Pelat Berasak Kantor	Jumlah Dokumen Rencana Berasak dan Pelat Berasak Kantor yang diarahkan	40.000.000	46.975.000	21.000.000	1.600.000	6.300.000	5.800.500	7.100.000	20.450.900	100.000	99,52	4	67.813.500	200,00	169,58	Inspektariat
6.01.01.03.03.09		Penyediaan Pelat dan Pelat Berasak Kantor	Jumlah Pelat Berasak Kantor dan Pelat Berasak Kantor yang diarahkan	300.000.000	1.867.918.112	998.040.000	88.135.200	291.338.012	338.972.000	271.519.262	988.975.616	100.000	99,05	36	2.816.894.276	300,00	281,60	Inspektariat

No	Skema OPD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (aspek output/ kegiatan)	Target/ Rencana OPD Kabupaten pada Tahun 2023 dan 2024	Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Berbasis APBD Tahun 2024			Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Tahun Berjalan	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Berbasis APBD Tahun 2024 (AKAP Tahun Pelaksanaan Sampai 30 Desember 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Berbasis APBD Tahun 2023 (%)
					K	Rp	%				
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.07.001		PEMBERIAN BANGUNAN BAKAR DABARAH PUSKESMAS LERISAN PUSKESMAS PANGRENGAN	Jumlah Unit Pemukiman Deras atau Sederhana Deras Jelutau yang dibangun	1 Unit	430.000.000	0	0	0	0	0	0,00
6.01.01.2.07.002		Pengadaan Fasilitas Kesehatan Deras atau Sederhana Deras Jelutau yang dibangun	Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan Deras atau Sederhana Deras Jelutau yang dibangun	10 Unit	300.000.000	0	0	0	0	0	0,00
6.01.01.2.07.003		Pengadaan Mafed	Jumlah Paket Mafed yang disediakan	3 Paket	250.000.000	0	0	0	0	0	0,00
6.01.01.2.07.006		Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Meubel lainnya yang disediakan	3 Unit	150.000.000	13	419.969.000	116.465.924	30.013.330	20.180.790	63,013,315
6.01.01.2.07.009		Pengadaan Asid Tah Berwujud Lainnya	Jumlah Unit Asid Tah Berwujud Lainnya yang disediakan	- 0	-	0	0	0	0	0	0,00
6.01.01.2.07.010		Pengadaan Struktur dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Struktur dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00
6.01.01.2.08		PEMBERIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Lapangan Penyelidikan Jasa Kemitraan, Swasta Dupa Akt dan Lainnya yang disediakan	12 Lapangan	180.000.000	72	143.773.214	48.593.214	192.799.864	132.237.000	73,376,647
6.01.01.2.08.002		Pengadaan Jasa Konsultansi, Swasta Dupa Akt dan Lainnya	Jumlah Lapangan Penyelidikan Jasa Kemitraan, Swasta Dupa Akt dan Lainnya yang disediakan	12 Lapangan	75.000.000	23	97.644.128	55.901.000	175.135.230	141.433.000	202.732,750
6.01.01.2.08.004		Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lapangan Penyelidikan Jasa Kemitraan, Swasta Dupa Akt dan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.01.01.2.09		PEMBERIAN BANGUNAN BAKAR DABARAH PUSKESMAS LERISAN PUSKESMAS PANGRENGAN	Jumlah Struktur dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00
6.01.01.2.09.001		Pengadaan Jasa Penyelidikan, Burea Penyelidikan, dan Jasa Konsultansi, Swasta Dupa Akt dan Lainnya	Jumlah Struktur dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	15 Unit	200.000.000	2	2.296.000	4.220.000	2.300.000	1	7,798,996
6.01.01.2.09.002		Pengadaan Jasa Penyelidikan, Burea Penyelidikan, dan Jasa Konsultansi, Swasta Dupa Akt dan Lainnya	Jumlah Struktur dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	15 Unit	200.000.000	12	87.916.140	17.275.144	14.667.800	2	3.675,000
6.01.01.2.09.006		Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Peralatan dan Meubel Lainnya yang disediakan	8 Unit	50.000.000	6	48.050.000	9.808.500	4.830.000	1	2.899,400
6.01.01.2.09.009		Pengadaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	200.000.000	1	240.756.647	134.272.468	4.795.500	1	106,713,995
6.01.01.2.09.011		Pengadaan/ Rehabilitasi Bangunan dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Struktur dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00

No	Sumber OPD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (seluruh kegiatan) (output)	Target Kinerja OPD/Kepolisian Tahun 2023 dan 2024	Realisasi Kinerja pada Triwulan												Target Capaian Kinerja dan Anggaran Bervolume (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2023 (%)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Bervolume (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2024 (%)	Unit Pengukuran								
					I			II			III			IV						1-3/2023			1-4/2024				
				K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp		
8.01.02.2.01.0001	Meningkatnya Kapabilitas Program	PROGRAM PENYELINGGABAN PENGAWASAN		4.750.000.000		125.076.500		221.818.000		218.604.600		652.814.750		1.218.215.000													
8.01.02.2.01.0001		INTERNAL		3.900.000.000		69.448.000		189.334.000		137.499.600		335.207.750		722.796.333													
8.01.02.2.01.0001			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Persektorial Daerah	24 Laporan		38.432.000		-		-		4	3.484.000		38.076.000		98,88		34		877.155.000		273,00		104,94		
8.01.02.2.01.0001			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Persektorial Daerah	24 Laporan		38.432.000		-		-		4	3.484.000		38.076.000		99,59		28		302.294.000		116,67		54,58		
8.01.02.2.01.0001			Jumlah Laporan Hasil Bero Layanan	108 Laporan		103.565.000		82.279.000		51.620.000		4	39.094.000		102.401.000		99,62		324		944.502.499		300,00		171,74		
8.01.02.2.01.0001			Jumlah Laporan Hasil Bero Layanan Kegiatan	37 Laporan		22.059.000		-		-		0	1.014.000		22.279.000		99,19		111		86.899.600		300,00		44,45		
8.01.02.2.01.0001			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (Jumlah) yang diterbitkan	20 Laporan		1.006.000.000		13.448.000		75.889.600		21	134.511.500		216.630.100		96,60		65		1.426.282.400		325,00		142,63		
8.01.02.2.01.0001			Jumlah Tindak lanjut monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Pengawasan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	2 Ekspedisi		600.000.000		-		-		2	2.500.000		6.380.000		92,19		6		791.791.430		300,00		40,63		
8.01.02.2.01.0001			Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut HASIL Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	2 Diskusi		450.000.000		19.940.000		25.044.300		4	72.882.794		122.671.794		16,66		8		477.058.044		600,00		100,12		
8.01.02.2.01.0001			PENYELINGGABAN PENGAWASAN BERKAITAN DENGAN TERTIBNYA		650.000.000		55.721.000		41.244.000		81.103.000		317.209.019		295.429.519						781.937.569						
8.01.02.2.02.0001			Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	7 Laporan		300.000.000		-		-				23.891.000													
8.01.02.2.02.0001			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan		550.000.000		44.248.000		55.721.000		2	317.309.019		295.429.519		96,12		36		781.937.569		300,00		142,17		
8.01.02.2.02.0001			PROGAM PENGAWASAN BERKAITAN DENGAN TERTIBNYA		1.900.000.000		650.447.962		94.999.500		23.891.000		322.244.000		413.114.000												
8.01.02.2.02.0001			REVISI SISTEM TIKS OF BIDANG PENGAWASAN	4 Rekomendasi		200.000.000		-		-				650.000													
8.01.02.2.02.0001			Pengawasan (Tingkat Di Bidang) Pemilihan	2 Rekomendasi		300.000.000		10.832.000		900.000		2	72.603.800		91.578.600		84,14		6		296.430.600		300,00		98,82		
8.01.02.2.02.0001			Pengawasan (Tingkat Di Bidang) Pemilihan	6 Pengingat Daerah		450.000.000		66.796.200		66.796.200		4	68.807.200		66.807.200		99,83		12		131.140.200		200,00		20,14		
8.01.02.2.02.0001			Pengawasan (Tingkat Di Bidang) Pemilihan	26 Pengingat Daerah		250.000.000		111.352.800		111.352.800		10	22.844.000		20.519.000		92,59		30		140.600.800		113,38		56,32		
8.01.02.2.02.0001			Pengawasan (Tingkat Di Bidang) Pemilihan	5 Kegiatan		450.000.000		218.213.004		14.811.000		5	132.299.500		150.254.500		88,54		13		333.884.300		200,00		71,97		
8.01.02.2.02.0001			Pengawasan (Tingkat Di Bidang) Pemilihan	5 Pengingat Daerah		250.000.000		139.346.672		4.415.000		2	27.713.100		30.128.100		97,45		6		171.474.772		120,00		68,59		
8.01.02.2.02.0001						17.144.921.400		1.442.797.728		1.442.797.728		2.388.187.489		1.460.822.177		8.495.914.639		95,19			20.691.744.870						

Tabel 2. 6 Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2026-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inklusif, andal, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Nilai	3,2	3,3	3,4	3,5	4
			Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Indeks persepsi anti korupsi	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5
			Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Indeks	82,98	83,02	83,14	83,27	85,85
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	79	79,5	79,6	79,7	79,8

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1	1	1	1	1
			Capaian kinerja perangkat daerah	Persen	80%	82%	83%	85%	86%

Sumber Data: Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

- a. Permasalahan dan hambatan internal:
 - 1) Sumber daya dan kompetensi aparatur masih terbatas seperti:
 - 2) Sertifikat manajerial Pimpinan APIP;
 - 3) Ketersediaan Auditor/PPUPD Ahli Pertama;
 - 4) Ketersediaan Auditor/PPUPD Ahli Muda;
 - 5) Ketersediaan Auditor/PPUPD Ahli Madya.
- b. Sumber daya anggaran masih terbatas seperti:
 - a) Belum terpenuhinya anggaran Inspektorat 1% dari pagu anggaran daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun;
 - b) Belum terpenuhinya insentif pengawasan.
- c. Sarana dan prasarana penunjang operasional masih terbatas:
 - a) 30% Auditor/PPUPD belum didukung fasilitas kerja yang memadai;
 - b) ruangan pemeriksaan belum memadai;

- d. Permasalahan dan hambatan eksternal yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya:
1. Kebijakan yang masih tumpang tindih dan sering berubah ubah;
 2. Perubahan lingkungan sosial, ekonomi dan politik;
 3. Koordinasi lintas OPD belum optimal;
 4. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi belum optimal;
 5. Tingkat kepercayaan masyarakat pada instansi pemerintah masih rendah;
 6. Benturan kepentingan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah mendukung misi ke-8 dengan tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rencana awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil Analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TASOK AKUR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2024	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PERENCANAAN				PRORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PELAKSANA DAERAH PEMBANGUNAN JANGKA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	INSPEKTORAT		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6		UNSUB PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						6.966.237.819,00						15	10.997.388.483,00	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH						6.966.237.819,00							10.997.388.483,00	
1.	6.0101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Promosi L. gion Keuangan Perangkat Daerah yang berprestasi (kegiatan dan insani)			100 Person	100 Person	5.444.221.427,00							7.884.502.491,00	
6.0101.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbakarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Mentawai			100 Person	100 Person	4.257.206.466,00							5.124.040.000,00	INSPEKTORAT
6.0101.202.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Tunjangan ASN			40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.153.266.466,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Uluwu, Tanjung						5.000.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NOMOR BUDJET / REKAPITULASI KELOMPOK	REVISI / REVISI / REVISI	TARGET PENCAPAIAN PERSIAPAN OPD	REALISASI CAPAIAN TUNJUK OPD	PENCAPAIAN TARGET OPD TUNJUK OPD	CARA KERJA DAN KEMUNGKINAN					PRORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRORITAS TAHUN 2027		REKAPITULASI PENCAPAIAN OPD	
								TARGET 2025	MAGU (MILYAR Rp)	LOKAS	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		ALOKASI	TARGET		ALOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							31 Mei	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00									
	6.01.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cukai dan Pengangkutan	Jumlah Persepsi Berbasis Cukai dan Pengangkutan yang Dihasilkan				17 Mei	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00									
	6.01.01.2.05.0005	Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Perawatan Kendaraan	Jumlah Dokumen Bahan Bakar dan Perawatan Kendaraan yang Dibutuhkan				2 Desember	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00									
	6.01.01.2.05.0005	Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Perawatan Kendaraan	Jumlah Dokumen Bahan Bakar dan Perawatan Kendaraan yang Dibutuhkan				2 Desember	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00									

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / SUBURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR BERDASAR RENCANA KERJA O/PD TAHUN 2024	PENCAPAIAN TARGET BELAJA O/PD TAHUN 2025	CARANA KERJA DAN KEMUNGKINAN						PRORITAS NASIONAL		KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN BILAJ BENCANA TAHUN 2027		REKORGANISASI DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						PAGU INDIKATIF 2024	PAGU INDIKATIF 2025	LOKAS	SUMBER DANA	PRORITAS NASIONAL		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
										12	13							
1	2		Jumlah Unit Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	5	7	2 Unit	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17			
	6.01.01.2.0F.0006	Pengembangan Fasilitas dan Sarana Lainnya	Jumlah Unit Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan			5 Unit	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17			
	6.01.01.2.0F.0000	Pengembangan Aspek Berprestasi	Jumlah Unit Aspek Berprestasi yang dilaksanakan			5 Unit	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KELOMPOK / SUB KEGATAN	NOMOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET PENCAPAIAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN	REALISASI DAPILAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN	PENCAPAIAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN	CARAN KIEFJA DAN KEBERAGUA PENCAPAIAN						FRASIKAN MAJU BENCANA TAMIN 2027		PENCAPAIAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS	SUMBER DANA	PROGRIAS NABONAL	CIEBERI	KELCOKOR SABUN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	6.01.01.2.B	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Layanan Pemeliharaan Layanan	Terdapatnya Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Layanan Pemeliharaan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							100 Persen	770.300.000,00							531.501.000,00	INSTRUKSI ORAT
	6.01.01.2.B.0002	Penyediaan Jasa Kumudat, Sumber Daya, dan Lain-lain	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Kumudat, Sumber Daya, dan Lain-lain yang Dibutuhkan				3 Laporan	60.000.000,00	Inda, Kertajaya, Membont, Sipoon, Uluw, Tumpang	DUNIA ALD (MSE) LUMAH (DAU)					115.000.000,00	INSTRUKSI ORAT
	6.01.01.2.B.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Lain-lain	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Lain-lain yang Dibutuhkan				4 Laporan	180.000.000,00	Inda, Kertajaya, Membont, Sipoon, Uluw, Tumpang	DUNIA ALD (MSE) LUMAH (DAU)					416.651.000,00	INSTRUKSI ORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / ISU KEGIATAN	TARGET PERIODE RESTRUKTURISASI OFD	REALISASI CAPAIAN TAMBAH TAMBAH 2024	PENCAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OFD 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEMUNGKINAN PENCAPAIAN						KELUARAN SARASAN	PRAKARAN MAJU RENCANA TAMBAH 2027		REVISI PENCAPAIAN RESTRUKTURISASI OFD	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF Rp	LOKAS	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ambil Perhatian dan Mencegah Lampiran yang Diperbaiki				8 Live	2.000.000,00		10	DANA ALYANASI LUMAJUNG (DAN)					2.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0000	Peningkatan Kualitas dan Gencarnya Berperilaku dan Berprestasi Lainnya							87.057.700,00	100, KEMAJUAN Membangun, Sempurna, Luar, Tunjangan						101.037.700,00	101.037.700,00
			Ambil Perhatian dan Mencegah Lampiran yang Diperbaiki														
			Ambil Perhatian dan Mencegah Lampiran yang Diperbaiki														
2.	6.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN RESTRUKTURISASI	Trailer Logistik Hasil Peningkatan Efisiensi Anggaran di 1				70 P Person	1.237.907.200,00								2.683.856.000,00	
	6.01.02.2.01	Peningkatan Pengembangan Peningkatan	Meningkatkan Kualitas Pengembangan Peningkatan Peningkatan				80 P Person	940.300.000,00								2.044.242.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NOMOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODIK REGISTRASI CIRD	REALISASI CAPAIAN BILANGAN TAHUN 2015	PRAKARSA TARGET BILANGAN TAHUN 2015	CARAN FINANSIAL DAN KEFINANSIAL POKOK				PANGRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2017				PEMANGKAT DAIRAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2015	PAGU KEBERHAJATAN (Rp)	LOKAS	SUMBER DANA	PROGRES NASIONAL	PROGRES DAERAH	TARGET	PAGU KEBERHAJATAN (Rp)	
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan				31 Laporan	643.000,00	Mhs. Kependidikan Merantau, Sison Ulin, Tumpang	DANA ALIH ANSIR ULMAM (DAU)				16.000.000,00	INTEK-IT-DINT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Desa				22 Laporan	305.477.000,00	Mhs. Kependidikan Merantau, Sison Ulin, Tumpang	DANA ALIH ANSIR ULMAM (DAU)				414.477.000,00	INTEK-IT-DINT
	6.01.02.2.01.0006	Kept. Sama Pengawasan Internal	Jumlah Keperawatan Pengawasan Internal/lingkungan				2 Keperawatan	100.000.000,00	Mhs. Kependidikan Merantau, Sison Ulin, Tumpang	DANA ALIH ANSIR ULMAM (DAU)				300.000.000,00	INTEK-IT-DINT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindakan Lanjut Persepsi dan SPN, R dan Tindakan Lanjut Hasil Persepsi dan SPN													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KINDAHLAHS KEGIATAN	TARGET ANALISA PENCAPAIAN REVISI REVISI O/PD	REALISASI CAPAIAN SILABUS TUNJUK TUNJUK	PILIHAN CARA TAKLAK OPD TUNJUK TUNJUK	CAPAIAN KINERJA DAN KEMUNGKINAN PENCAPAIAN						KELOMPOK SASARAN	PILIHAN ALTERNATIF JANUARI 2017		REKORDEK DARI PENGANGKUTAN PENGANGKUTAN
							TARGET 2016	INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PERIODAS NASIONAL	PERIODAS DAERAH		TARGET	INDIKATOR (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Zonasi Tingkat Risiko Tingkat Risiko dan Tingkat Risiko / Risk Penilaian dan APD	2 Dokumen			501.000.000,00	60. Kabupaten Mendawai, Spos Ulara, Tumpang	DAK ALOKASI UMUM (DAU)						251.000.000,00	INSTRUKSI OPD
6.01.02.2.0		Peningkatan Pengawasan dengan T. J. dan T. J. dan	Meningkatkan Kualitas Pengawasan dengan T. J. dan T. J. dan	67 Peran			297.945.200,00								600.014.000,00	INSTRUKSI OPD
6.01.02.2.0.0001		Pengawasan Penyediaan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Kegiatan Pengawasan yang Cukup	2 Laporan			147.602.400,00	60. Kabupaten Mendawai, Spos Ulara, Tumpang	DAK ALOKASI UMUM (DAU)						200.000.000,00	INSTRUKSI OPD
6.01.02.2.0.0002		Pengawasan dengan T. J. dan T. J. dan														

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET FISIK / STRUKTUR ORG	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015	PRAKARAN TARGET BELAKANG TAHUN 2015	CARAN LINEAR DAN KEMUNGKIPAN				PRASARANA MAJU BENCANA TAHUN 2017			REKAM DARI PENCANTUMAN JAWAB			
								TARGET 2015	RAGU INDIKATOR (Rp)	LOKAS	SUMBER BANA UMUM (DAL)	PROFITAS NASIONAL	DAUR	KELOMPOK		TARGET	RAGU INDIKATOR (Rp)	
1	2								8	0	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	150.300.000,00											201.500.000,00	INSTRUKSI
3	6.01.03	PROGRAM REBUTSIAN KEBUMAHAN, KEMERIAAN, PRODUKSI DAN ASISTANSI	Revisi dan Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian		300 Level 3,30 Level	204.225.000,00											571.225.000,00	INSTRUKSI
6.01.03.28		Perencanaan Kegiatan Terpadu dan Pengembangan	Mengembangkan sistem dan prosedur		70 Person	55.540.000,00											130.740.000,00	INSTRUKSI
6.01.03.28.0002		Perencanaan Kegiatan Terpadu dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		4 Laporan	55.540.000,00											130.740.000,00	INSTRUKSI

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijabarkan berbagai aspirasi Masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan Program/ Kegiatan yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap arah kebijakan nasional diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN 2025–2029, RKP Tahun 2026, serta kebijakan teknis dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun arah kebijakan nasional tahun 2026 mengacu pada sasaran RKP 2026, dengan tema: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” tema ini diperkuat dengan prioritas nasional yang relevan dengan peran Inspektorat, antara lain:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
 - a. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan pembangunan.
 - b. Penguatan pengawasan internal pemerintah dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Stabilitas Keamanan dan Kepastian Hukum.
 - a. Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penguatan APIP.
 - b. Peningkatan kapasitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penguatan peran APIP dalam penjaminan mutu pelayanan publik berbasis hasil evaluasi dan pengawasan.

4. Transformasi Digital Pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan berbasis elektronik (e-audit, e-monitoring) untuk efektivitas dan efisiensi. Kebijakan Pengawasan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengarahkan Inspektorat Daerah untuk:

- a. Melakukan pengawasan secara preventif dan detektif, bukan hanya represif.
- b. Menyusun dan melaksanakan program pengawasan tahunan berdasarkan pendekatan risiko (risk-based audit).
- c. Mengoptimalkan sinergi antara APIP daerah dan APIP pusat, serta penguatan kapasitas SDM pengawas.
- d. Mendukung peran Inspektorat Daerah sebagai Quality Assurance dan Consulting Partner bagi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan nasional dan daerah, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu memperhatikan arahan dan kebijakan dari:

- a. Kementerian Dalam Negeri, melalui Itjen dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- b. BPKP, sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP.
- c. KPK, dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).
- d. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terkait pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
- e. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam koordinasi pengawasan lintas daerah dan penguatan peran APIP regional.

Dari hasil telaah kebijakan nasional tersebut, maka terdapat beberapa implikasi langsung terhadap perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026, yakni:

- a. Perlu penguatan sistem pengawasan berbasis risiko terhadap program strategis daerah dan penggunaan dana transfer.

- b. Meningkatkan fungsi pendampingan dan reviu terhadap perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih tepat sasaran.
- c. Mendorong pelaksanaan penilaian mandiri SPIP dan kapabilitas APIP secara berkala.
- d. Perluasan fungsi pengawasan tematik yang selaras dengan prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, dan reformasi birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2026-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Daerah. Demikian Pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Indeks persepsi anti korupsi	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4	Indeks
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan		2. Indeks Manajemen Resiko (MRI)	82,82	82,98	83,02	83,14	83,27	85,85	Indeks
		3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	Indeks
		1. Nilai SAKIP	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	Nilai
Kinerja Inspektorat		2. Jumlah Inovasi yang diterapkan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Inovasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Capaian kinerja perangkat daerah	75%	80%	82%	83%	85%	86%	Persen

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah pada Tahun 2026 terdiri dari 3 rumusan Program, 10 rumusan Kegiatan, 33 Sub Kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp6.996.237.819,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut adalah Rangkaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, seperti tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3. 2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	INSPEKTORAT	6.966.237.819,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.444.221.627,00
A.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.257.306.466,00
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.153.266.466,00
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.040.000,00
A.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.892.000,00
2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	212.892.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.085.400,00
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000,00
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.357.000,00
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.846.400,00
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	15.500.000,00
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00
3.6	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.382.000,00
A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00
4.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00
4.3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0,00
4.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00
A.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.390.000,00
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.400.000,00
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.990.000,00
A.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.547.761,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.986.000,00
6.2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.004.000,00
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000,00
6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.557.761,00
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.237.787.200,00
B.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	940.242.000,00
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	73.918.000,00
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	67.610.000,00
1.3	Reviu Laporan Kinerja	222.888.000,00
1.4	Reviu Laporan Keuangan	64.043.000,00
1.5	Pengawasan Desa	300.477.000,00
1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	109.501.000,00
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	101.805.000,00
B.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	297.545.200,00
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	147.192.400,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	284.228.992,00
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	284.228.992,00
C.1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	55.242.000,00
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	55.242.000,00
C.2	Pendampingan Dan Asistensi	228.986.992,00
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	54.010.000,00
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55.345.000,00
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	71.099.000,00
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48.532.992,00
	Total	6.966.237.819,00

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana	Rencana Capaian RENCANA DPD	Praktik Capaian Target	Target 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kategori Sasaran	Praktik Target	Maju Rencana Pagu Indikatif [Rp]	Perangkat Daerah Penanggung
								Target 2026	Pagu Indikatif [Rp]	Loke				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		INSPEKTORAT					6.966.237.819,00					10.947.388.453,00		
		INSPEKTORAT DAERAH					6.966.237.819,00					10.947.388.453,00		
		PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.444.221.627,00					7.686.302.461,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.237.306.466,00					5.124.040.000,00		
		Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		Jumlah Orang yang Menervisi Gaji dan Tunjangan ASN					40 Orang/bulan					5.000.000.000,00		
		INSPEKTORAT					104.040.000,00					124.040.000,00		
		INSPEKTORAT DAERAH					104.040.000,00					124.040.000,00		
		Administrasi Pemerintahan Daerah					212.892.000,00					412.892.000,00		
		Kepegawaian Perangkat Daerah												
		Perencanaan dan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai standart					100 Person							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran		Prakiraan Mula Rencana Pagu Indikator (Rp)	Peringkat Daerah Penanggung			
						TARGET 2024 Pagu Indikator (Rp)	Target	Sumber Dana	Lokasi	Daerah	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	01	2.05	0000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			40 Orang	212.892.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	412.892.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai standar		100 Peran	689.703.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	689.703.400,00		
6	01	2.06	0003	Penyediaan Komponen Instalasi			15 Paket	13.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	13.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2 Paket	51.357.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	51.357.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3 Paket	130.846.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	130.846.000,00	INSPEKTORAT	

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Renstra	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Pradiraan Maju Rencana Pagu Indikator (Rp)	Peringkat Daerah Perminggu
							Target 2026 Pagu Indikator (Rp)	Lokasi Sumber Dana	Nasional	Daerah	13	14			
6	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan			1 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tualipat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					17.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan											
				Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disiapkan			3 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tualipat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					35.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tualipat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					400.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah										691.568.300,00	
				Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah			100 Persen	0,00							
6	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan			1 Unit	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					400.000.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Akhir Periode Rencana	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prakiraan Capaian Target	Target 2026 Pagu Indikatif (Rp)			Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkoat Daerah Penanggung	
							8	9	10	11	12	13				
6	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	14	15	16	17
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit					5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas				INSPEKTORAT
6	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas				INSPEKTORAT
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit					5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas				INSPEKTORAT
6	01	2.07	0008	Pengadaan Aser Tak Berwujud				0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas				INSPEKTORAT
				Jumlah Unit Aser Tak Berwujud yang Disediakan			0 Unit					5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas				INSPEKTORAT
6	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				276.390.000,00				Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas				INSPEKTORAT
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 Persen					5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas				INSPEKTORAT
6	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas				INSPEKTORAT
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan					5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas				INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prokiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Proritas Daerah	Proritas Nasional	Proritas Perangkoat Daerah	Proritas Perangkoat Nasional	
							Target 2026	Paga Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana						Target
6	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan			4 Laporan	180.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas			416.651.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.09		Pemeliharaan Bawang Merah Persegi Panjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persegi	163.547.761,00				Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas			235.947.761,00	INSPEKTORAT
6	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			15 Unit	13.986.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas			15.986.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15 Unit	34.004.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas			54.004.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.09	0006	Pemeliharaan Perabotan dan Meja Lainnya			8 Unit	28.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas			58.000.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana	Realisasi Capaian RENJA OPD	Profilisasi Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktik Monev	Praktik Monev	Praktik Monev		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana					Nasional	Daerah
1	6 01 01 2 09 0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	-	-	-	1 Unit	87.857.761,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	107.557.761,00	INSPEKTORAT	
6	01 02	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	-	-	-	76 Permen	1.237.787.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	2.683.856.000,00		
6	01 02	Pengawasan dan Pengendalian Internal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	-	-	-	65 Permen	940.242.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	2.024.242.000,00		
6	01 02	0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	4 Laporan	73.918.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	158.918.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 02	0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	4 Laporan	67.610.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	157.610.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 02	0003 Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	-	-	-	131 Laporan	222.888.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	642.888.000,00	INSPEKTORAT	

No	Kode	Uraian / Bidang, Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Produktif Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Pradiklan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkoat Dan/atau Perangkoang				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Sumber Dana	Nonlokal	Darah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	01 02 2.01 0004	Rentu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Rentu Laporan Keuangan	37 Laporan	64.043.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tualapai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	INSPEKTORAT	84.043.000,00						
6	01 02 2.01 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan	300.477.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tualapai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	INSPEKTORAT	419.477.000,00						
6	01 02 2.01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Keaktifan Pengawasan Internal yang Perbentuk	2 Keaktifan	109.501.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tualapai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	INSPEKTORAT	309.501.000,00						
6	01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	2 Dokumen	101.805.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tualapai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	INSPEKTORAT	251.805.000,00						
6	01 02 2.02	Penyuluhan dengan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	67 Peran	297.545.200,00			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	INSPEKTORAT	659.614.000,00						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu;

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 serta Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan; dan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunna dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 6.966.237.819,00- (enam miliar sembilan ratus juta enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.444.221.627,00,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat yang terdiri dari 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp4.257.306.466,-.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 4.153.266.466,-
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran sebesar Rp104.040.000,-

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp212.892.000,-.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran Rp212.892.000,-

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp534.085.400,-.

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp13.000.000,-
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp51.357.000,-
- 3) Penyediaan Bahan Logistik, dengan anggaran sebesar Rp130.846.400,00,-
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp15.500.000,-
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp308.382.000,-

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp0,-
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp0,-
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp0,-
- 4) Pengadaan Aset Tak Berwujud, dengan anggaran sebesar Rp0,-

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.276.390.000,-.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp95.400.000,-
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp180.990.000,-

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp163.547.761,-.

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp13.986.000,-
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp34.004.000,-
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp28.000.000,-
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp87.557.761,-.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.237.787.200,-. Program ini dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu yang terdiri dari 4 Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus yang terdiri dari 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp940.242.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp73.918.000,-
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp67.610.000,-
- 3) Reviu Laporan Kinerja, dengan anggaran sebesar Rp222.888.000,-
- 4) Reviu Laporan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp64.043.000,-
- 5) Pengawasan Desa, dengan anggaran sebesar Rp300.477.000,-
- 6) Kerja Sama Pengawasan Internal, dengan anggaran sebesar Rp109.501.000,-
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan anggaran sebesar Rp101.805.000,-

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp297.545.200,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan anggaran sebesar Rp147.192.000,-
- 2) Pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan anggaran sebesar Rp150.352.800,-

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.237.787.200,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, Irban Wilayah dan Irban

Khusus yang terdiri dari 5 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp55.242.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp55.242.000,-

- b. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp54.010.000,-.

- c. Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp55.345.000,-

- d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp71.099.0000,-

- e. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp48.532.292,-.

Tabel 4. 1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JAWAB PERIODE RENJIRA OPD	REALISASI CAPSAI RENJIRA TAHUN 2025	PRAKORAN CAPSAI TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPILAH WIREWA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK BUDAYA	PRAKORAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	
1	2	INSPEKTORAT DAERAH		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6		URUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			14.489.344.705,00							14.887.402.531,00		
6.01		INSPEKTORAT DAERAH			14.489.344.705,00							14.887.402.531,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG KEMAJUAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil pemenuhan SAKOP oleh Inspektori Daerah Kabupaten/Kota	4 Nilai	13.948.655.031,00						4. Nilai	13.948.655.031,00		
6.01.01.2.01		Perencanaan dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang terdapat dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai	7 Dokumen	99.667.000,00					Inspektori kota Yogyakarta	6 Dokumen	109.634.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	31.251.700,00	NDI Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muja	PELACAPAN ASLI DAERAH (PAC)			Inspektori kota Yogyakarta		34.376.970,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DKD	Jumlah Dokumen RKA-DKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-DKD	1 Dokumen	2.410.000,00	NDI Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muja	PELACAPAN ASLI DAERAH (PAC)			Inspektori kota Yogyakarta		2.661.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DKD												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKENING DAERAH OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRORABAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2		4	7	6	5	4	3	2	1	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen			104.040.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Spora Utara, Tualang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkeadilan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			124.040.000,00	INSPEKTORAT
8.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertulangnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai standar	100 Person			212.892.000,00							Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			412.892.000,00	INSPEKTORAT
8.01.01.2.06.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang			212.892.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Spora Utara, Tualang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			412.892.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	USULAN / RENCANA URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPERASIONAL 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Transparansi Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	6	7	100 Persen	9	10	11	12	13	14	15	16	17	INSPEKTORAT	
							034.085.400.00									689.703.400.00		
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibekalkan	15 Paket			13.000.000.00	Kab. Kepulauan Merawi, Sipora Utara, Tupajoi	DANA ALOKASI UNLUM (DAU)						15.000.000.00		INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			51.357.000.00	Kab. Kepulauan Merawi, Sipora Utara, Tupajoi	DANA ALOKASI UNLUM (DAU)							71.357.000.00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REPORTING OPD	REALISASI RENJANA CAPAIAN TAHUN 2024	PRANORAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KHUSIA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PAMBIJAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PESANGKAT DASAR PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							3 Pnsat	9 130.846.400,00	Kab. Kepulauan Merawi, Sipora Utara, Tulajelut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	13	15	16	
1	2	3.	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Didistribusikan	5	6	7	3 Pnsat	9 130.846.400,00	10 Kab. Kepulauan Merawi, Sipora Utara, Tulajelut	11 DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	13	15	16	17
														150.846.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengundangan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Merawi, Sipora Utara, Tulajelut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				17.000.000,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengundangan yang Didistribusikan												
	6.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Merawi, Sipora Utara, Tulajelut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				35.000.000,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Didistribusikan												
	6.01.2.06.0008		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN BINA OPD TAHUN 2024	PRAKSIAN COCOK TARGET BINA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PENYAMPAIAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Komendasi SPPD	12 Laporan			300.300.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Sistem Uluas, Tulopit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Menjauhkan Kita Kita Pem erintahan Dan Berkeadilan Untuk Rakyat Yang Berkualitas			400.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07		Pengisian Barang Milik Daerah Pelanggaran Pemertanda Daerah	Terdapatnya Pengisian BMDD urusan Perangkat Daerah	100 Peman			0,00					Menjauhkan Kita Kita Pem erintahan Dan Berkeadilan Untuk Rakyat Yang Berkualitas			691.568.300,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0001		Pengisian Kebutuhan Perorangan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan dan Kebutuhan Kebutuhan Dinas Jabatan yang Dianggarkan	1 Unit			0,00	Kab. Kepulauan Meranti, Sistem Uluas, Tulopit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Menjauhkan Kita Kita Pem erintahan Dan Berkeadilan Untuk Rakyat Yang Berkualitas			400.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0002		Pengisian Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUMAH / BIDANG URUMAH / BIDANG KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE PERHITUNGAN OPS	REALISASI KEGIATAN TAHUN 2024	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KETAHAPKAN PERENCANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKSIAN BAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	2 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Meranti, Spore Uluak, Tunjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan Tata Perencanaan Dan Pelaksanaan Yang Akuntabel Serta S. Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	-	-	-	-	55.600.000,00	INSPEKTORAT	
8.01.01.2.07.0006		Pengaman Peralihan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	5 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Meranti, Spore Uluak, Tunjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan Tata Perencanaan Dan Pelaksanaan Yang Akuntabel Serta S. Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	-	-	-	-	85.900.300,00	INSPEKTORAT	
8.01.01.2.07.0008		Pengadaan Ases Tak Berwujud	Jumlah Unit Ases Tak Berwujud yang Didistribusikan	0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Meranti, Spore Uluak, Tunjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan Tata Perencanaan Dan Pelaksanaan Yang Akuntabel Serta S. Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / RENCANA SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEANGKA PEINDAHAN				PRORITAS		KEL. CIKOPK SARAPAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	6.01.01.2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6	7	100 Persen	9	278.300.000,00	10	11	12	13	14	15	16	17
													Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			532.551.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didapatkan	3 Laporan				95.400.000,00	Kab. Kepulauan Merawan, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			115.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didapatkan	4 Laporan				180.990.000,00	Kab. Kepulauan Merawan, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			416.651.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.01.01.2.09		Pemeliharaan Burung Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Tindakannya Pemeliharaan BMD Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	100 Pohon				100 Pohon	163.547.761,00				Mewujudkan Tata Kelola Pemertanian dan Perikanan Kabupaten Bantul yang Berkeadilan dan Berkeadilan 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkeadilan			235.547.761,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit				15 Unit	13.986.000,00	Kab. Klaten Merawati, Spora Utara, Tulupat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Berkeadilan 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkeadilan			15.986.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit				15 Unit	34.004.000,00	Kab. Kepulauan Merawai, Spora Utara, Tulupat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Berkeadilan 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkeadilan			54.004.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUB PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PENANAMAN				PRORITAS		KELOMPOK SUBSIDI	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2027		REKOR DARI PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2		Jumlah Fasilitas dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	5	6	7	8 Unit	9	10	11	12	13	14	15	16	17	INSPEKTORAT
	6.01.2.00.0009	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Spora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewadahi Kebutuhan Kebutuhan Pemeliharaan Perawatan Pabrik Yang Buruk, Akumulasi Berkualitas 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas			58.000.000,00		
2	6.01.02	PROGRAM PENGALIHAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Tahun Anggaran N-1	-	-	-	1 Unit	87.557.781,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Spora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewadahi Kebutuhan Pemeliharaan Perawatan Pabrik Yang Buruk, Akumulasi Berkualitas 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas			107.557.781,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01	Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam Pemerintahan Daerah	-	-	-	70 Persen	1.237.787.200,00							2.883.856.000,00		
							65 Persen	940.242.000,00				Mewadahi Kebutuhan Pemeliharaan Perawatan Pabrik Yang Buruk, Akumulasi Berkualitas 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.024.242.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemecatan Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	73.918.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Spora Utara, Tuluepat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Akuntabel Serta Berkualitas dan Berkeadilan	-	158.918.000,00		INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah					4 Laporan	67.610.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Spora Utara, Tuluepat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Akuntabel Serta Berkualitas dan Berkeadilan	-	157.610.000,00		INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja					131 Laporan	222.888.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Spora Utara, Tuluepat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Akuntabel Serta Berkualitas dan Berkeadilan	-	642.888.000,00		INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENSTRA OPD TAHUN 2024	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	75 Peresen	228.987.992,00	10	9	11	12	13	14	15	16	17	INSPEKTORAT	
													437.987.992,00			
	6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urutan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	54.010.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tulangt							159.011.000,00		INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26 perangkat daerah	55.345.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tulangt							179.345.000,00		INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penerimaan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2024	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENY OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGWA PERENCANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENUNGGUNG JAWAB	
							TARGET 2028	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monev, dan Pengawasan Mata Uraian Pelaksanaan dan Peningkatan Kinerja	2 Kegiatan			2 Kegiatan	71.099.000,00	Kab. Kepulauan Meratawi, Spora Utara, Tutupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang berbasis Akuntabel Serta Berkeadilan S. Peningkat an Kualitas Masyarakat Berkeadilan			91.099.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan													
			Jumlah Peningkat Daerah yang Diakui Peningkatan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integrasi	2 perangkat daerah			2 perangkat daerah	48.532.992,00	Kab. Kepulauan Meratawi, Spora Utara, Tutupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang berbasis Akuntabel Serta Berkeadilan S. Peningkat an Kualitas Masyarakat Berkeadilan			68.532.992,00	INSPEKTORAT
J U M L A H								6.966.237.818,00							10.947.388.433,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah ini berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra tahun 2026 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Inspektorat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan revidi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Evaluasi Bupati; dan

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2026.

Tuapejat, 22 Desember 2025
Inspektur Daerah



Serieli Bawamenewi, SH, CGCAE
NIP. 19830905 200802 1 001